

## Persepsi *Stakeholders* Tentang Pengajaran Akuntansi Pemerintahan; Hambatan Dan Tantangan

Vita Fitria Sari<sup>1\*</sup>, Mayar Afriyenti<sup>2</sup>, Fefri Indra Arza<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Negeri Padang

e-mail: vitafitriasari@gmail.com

Diterima: 6 September 2018  
Revisi : 20 Oktober 2018  
Available Online: 30 November 2018

### KEYWORD

accounting education, challenges,  
government accounting, obstacles,  
university

### A B S T R A C T

*This research aims to explore stakeholders' perception towards government accounting subject education in public and private universities in Padang City as a part of regional management reforms. The purpose of this study to investigate stakeholders' perception toward government accounting subject in the accounting curriculum; the level of lecturers' teaching interest towards government accounting subject; the existence of teaching resources; and the suitability between users' need and content of government accounting subject in higher education. Data was collected by questionnaire sent to stakeholders which consist of lecturers, students, and users and analyzed by using statistic descriptive. The results of this study found that government accounting subject already offer in accounting curriculum both bachelor and diploma degree on public and private university joined this study; but unfortunately government accounting subject only take 3 or 4 credit hours from total hours; less than 4% from total accounting curriculum. This study also found lack of lecturers teaching interest, also conventional learning method and resources for this subject. Fortunately, the content of government accounting subject in universities already suitable with users' need. Some obstacles and challenges has been identified in this study can be condisered as recommendation in developing future government accounting education in university.*



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

### PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didorong karena meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai paket perundang-undangan baru, dimulai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara serta dilanjutkan dengan terbitnya PP No.24 tahun 2005 tentang

---

Standar Akuntansi Pemerintahan. Inilah awal dikenalnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Pada tahun 2010 telah diterbitkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005.

Lebih lanjut Nordiawan dkk (2010) mengemukakan bahwa reformasi di banyak negara, khususnya Indonesia, juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah mengelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Salah satu tuntutan reformasi keuangan daerah atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury dalam Mardiasmo, 2002). Sedangkan transparansi merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yakni keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo dan Tomasi dalam Mardiasmo, 2002). Akuntansi pemerintahan memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia meperngaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Melihat semakin pentingnya peran sumber daya manusia khususnya yang berlatar belakang akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, tentu berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap lulusan D3 dan S1 akuntansi yang benar-benar memahami bidang sektor publik khususnya pemerintahan, sehingga bisa membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Menurut (Krah & Aveh, 2013) reformasi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan suatu negara membutuhkan perubahan fokus dalam pengajaran akuntansi sektor publik untuk memastikan bahwa pengetahuan dan kompetensi lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Berbagai perubahan praktek akuntansi pemerintahan diatas, mendorong perguruan tinggi sebagai penyedia lulusan D3 dan S1 Akuntansi untuk membenahi kurikulum, metode pengajaran dan bahan ajar untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan praktek akuntansi yang terjadi pada pemerintah. Namun, penelitian tentang pengajaran akuntansi sektor publik adalah hal yang sering diabaikan, hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh (Sciulli & Sims, 2008) serta didukung oleh hasil penelitian (Krah & Aveh, 2013).

Teori persepsi yang dijelaskan oleh Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan persepsi sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa persepsi setiap orang secara individual mengatur dan menginterpretasikan apa yang ditangkap oleh sensor mereka. Oleh karena itu setiap individu bisa menghasilkan persepsi yang berbeda-beda, tergantung dengan kesan yang mereka tangkap dan bagaimana mereka menerjemahkannya. Bahkan disebutkan pula bahwa kadang apa yang ditangkap oleh sensor individu yang akhirnya menjadi persepsi bisa berbeda dengan realita. Tentu saja ini membuat persepsi menjadi penting dalam proses belajar, karena orang-orang berperilaku berdasarkan persepsi mereka tentang realita, dan bukan berdasarkan realita yang sebenarnya ada.

Akuntansi pemerintahan sering dianggap sebagai bidang akuntansi yang terabaikan walaupun beberapa penelitian telah dilakukan diberbagai negara untuk mengeksplorasi tentang pengajaran bidang akuntansi sektor publik/pemerintahan namun jumlahnya masih sangat terbatas. Salah satunya adalah (Sciulli & Sims, 2008) yang meneliti tentang pengajaran akuntansi sektor publik di Australia, selanjutnya (Krah & Aveh, 2013) juga menginvestigasi tentang pengajaran akuntansi sektor publik di Ghana. Oleh karena itu penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Krah & Aveh, 2013), namun penelitian sebelumnya hanya menilai persepsi dari sisi dosen sebagai pengajar sedangkan penelitian ini dirancang untuk melihat persepsi dosen, mahasiswa dan pengguna.

Penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas tentang pengajaran akuntansi sektor publik di berbagai negara. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk organisasi yang bertujuan selain mencari laba, oleh karena itu sektor publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hoesada (2006) menjelaskan bahwa organisasi nirlaba (sektor publik) dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pemerintah dan non pemerintahan. Jika penelitian terdahulu lebih menggali pengajaran akuntansi sektor publik di berbagai Negara, maka penelitian ini lebih spesifik pada pengajaran akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian dari pengajaran akuntansi sektor publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana status pengajaran akuntansi pemerintahan pada level lulusan D3 dan S1 pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang untuk dapat menyesuaikan keahlian apa yang benar-benar dibutuhkan oleh lapangan kerja seiring dengan reformasi dalam bidang akuntansi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana persepsi *stakeholder* terhadap pengajaran akuntansi pemerintahan. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengajaran akuntansi pemerintahan yang terdiri dari dosen (pengajar), mahasiswa, dan pengguna (*users*) yang diwakili oleh manajer sektor publik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka terdapat 4 perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana persepsi *stakeholders* terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan pada kurikulum yang ada di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?; 2) Bagaimana ketertarikan dosen dalam pengajaran dan pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?; 3) Bagaimana metode pengajaran dan materi yang diterapkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?; 4) Bagaimana kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang?.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Sekaran (2000) penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini dilakukan pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Kota Padang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah *stakeholders* yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan pengguna (*users*) dalam bidang akuntansi pemerintahan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kriteria untuk dosen adalah dosen yang mengajar akuntansi pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang dengan pendidikan minimal S2 dan telah memiliki pengalaman mengajar minimal 1 tahun. Kriteria untuk mahasiswa adalah mahasiswa jurusan akuntansi pada Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang yang telah mengambil mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sedangkan pengguna diwakili oleh manajer publik yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang yang bertanggung jawab dalam bidang akuntansi dan pelaporan. Oleh karena itu responden pengguna dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan yang ada di masing-masing OPD. Analisis data dilakukan dengan melihat statistik dekriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berikut ini adalah gambaran demografi responden dalam penelitian ini:

**Tabel 1.** Demografi Responden

Deskripsi	Dosen	Mahasiswa	Pengguna
<b>Jenis Kelamin:</b>			
Laki-Laki	22,00%	22,95%	44,66%
Perempuan	78,00%	77,05%	55,34%
<b>Latar Belakang Pendidikan:</b>			
D3	-		15,53%
S1	-		59,22%
S2	96,00%		25,24%
S3	4,00%		-

Deskripsi	Dosen	Mahasiswa	Pengguna
Bidang Keahlian			
Akuntansi Keuangan	40,00%		
Akuntansi Manajemen	30,00%		
Akuntansi Sektor Publik/Pemerintahan	20,00%		
Lainnya	10,00%		
Perguruan Tinggi Asal			
PTN A	42,00%	46,18%	
PTN B	16,00%	21,53%	
PTS A	16,00%	15,01%	
PTS B	14,00%	17,28%	
PTS C	12,00%	-	

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Berikut ini adalah gambaran hasil penelitian ini untuk menjawab 4 pertanyaan pada bagian perumusan masalah:

**a. Persepsi *stakeholders* terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan pada kurikulum yang ada di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.**

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi *stakeholders* terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan pada kurikulum yang ada di PTN dan PTS di Kota Padang. Pada bagian ini *stakeholders* diwakili oleh dosen dan mahasiswa. Awalnya penelitian ini menyebarkan kuisioner pada 2 PTN dan 3 PTS di Kota Padang, namun ternyata PTS C tidak menawarkan mata kuliah akuntansi pemerintahan, oleh karena itu tabel 4 hanya menjelaskan jawaban status mata kuliah akuntansi pemerintahan pada 2 PTN dan 2 PTS di Kota Padang. Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa 2 PTN dan 2 PTS yang berpartisipasi dalam penelitian ini menawarkan mata kuliah akuntansi pemerintahan dalam kurikulum akuntansi baik S1 dan D3, meskipun hanya 3 Perguruan Tinggi yang menawarkan akuntansi pemerintahan sebagai salah satu bidang keahlian. Namun, akuntansi pemerintahan hanya menempati porsi kurang dari 4% dari total kurikulum akuntansi yang ada di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krah & Aveh, 2013) di Ghana yang menunjukkan bahwa bidang akuntansi sektor publik hanya menempati proporsi yang kecil dalam total kurikulum akuntansi pada perguruan tinggi di Ghana.

**Tabel 2.** Status Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan

No.	Keterangan	S1			D3	
		PTN A	PTS A	PTS B	PTN A	PTN B
1.	Akuntansi Pemerintahan ditawarkan sebagai salah satu bidang keahlian akuntansi	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya
2.	Akuntansi pemerintahan ditawarkan sebagai mata kuliah wajib	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Bobot SKS	4	3	3	4	4
4.	Total Bobot SKS	144	145	144	113	113
	Persentase	2.78%	2.07%	2.08%	3.63%	3.63%

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Tabel 3 dibawah ini merupakan rekapitulasi jawaban dari responden mahasiswa yang dibawah ini menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan. Kuisioner yang digunakan untuk menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan telah melewati uji validitas dan reabilitas dan telah dinyatakan valid dan reliabel (lihat lampiran). Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa responden mahasiswa menganggap akuntansi pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah yang menarik untuk dipelajari dan relevan dengan mata kuliah akuntansi lainnya, namun tidak bermanfaat dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya. Namun disisi lain responden mahasiswa merasa mata akuntansi pemerintahan tidak terlalu memberikan kemudahan dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya begitu juga dengan

membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi lainnya. Sebaliknya mahasiswa menyetujui bahwa mata kuliah lain dapat membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan dan menjadi pondasi dasar dalam memahami mata kuliah akuntansi pemerintahan.

**Tabel 3. Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan**

No.	PERNYATAAN	Rata-Rata	TCR	Kriteria
1.	Akuntansi pemerintahan adalah salah satu mata kuliah yang menarik untuk dipelajari	4.08	81.51%	Sangat Baik
2.	Mata kuliah akuntansi pemerintahan relevan dengan mata kuliah akuntansi lainnya.	3.87	77.42%	Baik
3.	Mata kuliah akuntansi pemerintahan memberikan kemudahan dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya.	3.63	72.55%	Baik
4.	Mata kuliah akuntansi pemerintahan membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi lainnya namun tidak signifikan.	3.32	66.39%	Baik
5.	Mata kuliah akuntansi pemerintahan tidak bermanfaat dalam memahami mata kuliah akuntansi lainnya.	3.76	75.29%	Baik
6.	Mata kuliah akuntansi lainnya dapat membantu pemahaman terhadap mata kuliah akuntansi pemerintahan	3.76	75.13%	Baik
7.	Mata kuliah akuntansi lainnya dapat menjadi pondasi dasar dalam memahami mata kuliah akuntansi pemerintahan	3.93	78.60%	Baik

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

**b. Ketertarikan dosen dalam pengajaran dan pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.**

Permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana ketertarikan dosen dalam pengajaran dan pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi. Kuisisioner yang digunakan pada bagian ini juga telah melalui uji validitas dan reliabilitas telah dapat dinyatakan valid dan reliabel (lihat lampiran). Tabel 4 dibawah ini menjelaskan bahwa secara umum membahas isu/topik dalam bidang akuntansi pemerintahan, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan topik akuntansi pemerintahan dianggap menarik oleh responden dosen dalam penelitian ini. Namun tidak halnya dengan mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan dan mengajar mata kuliah lain yang relevan dengan bidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan, begitu juga halnya dengan menyusun bahan ajar untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan dan bahkan yang paling kurang diminati adalah membuat buku dengan topik akuntansi pemerintahan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Krah & Aveh, 2013) yang menunjukkan rendahnya minat dosen dalam mengajar pada bidang akuntansi sektor publik.

**Tabel 4. Ketertarikan Dosen Terhadap Bidang Akuntansi Pemerintahan**

No.	Pernyataan	Rata-Rata	TCR	Kriteria
1.	Membahas isu/topik dalam bidang akuntansi pemerintahan	3,91	78.18%	Baik
2.	Mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan	3.42	68.48%	Baik
3.	Mengajar mata kuliah lain yang relevan dengan bidang akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan	3.48	69.70%	Baik
4.	Menyusun bahan ajar mata kuliah akuntansi pemerintahan	3.34	66.88%	Baik
5.	Menulis buku mata kuliah akuntansi pemerintahan	3.06	61.21%	Baik
6.	Melakukan penelitian bidang akuntansi pemerintahan	3.70	73.94%	Baik
7.	Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait bidang akuntansi pemerintahan	3.79	75.76%	Baik

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

**c. Metode pengajaran dan materi yang diterapkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.**

Penelitian ini juga mengidentifikasi metode pengajaran dan materi yang diterapkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan pada PTN dan PTS di Kota Padang. Tabel 5 menunjukkan bahwa metode pengajaran yang digunakan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan seluruh PTN dan PTS dalam penelitian ini adalah dosen menggunakan ilustrasi dari buku teks dan studi kasus. Sedangkan untuk metode lainnya seperti tutorial juga dilakukan pada PTN di Kota Padang, sedangkan pembicara dari luar (dosen tamu) itu hanya digunakan oleh PTS A. Namun jurnal atau artikel akuntansi pemerintahan masih belum digunakan sebagai metode pengajaran atau pendekatan dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan.

**Tabel 5.** Metode Pengajaran Akuntansi Pemerintahan

No.	Metode Pengajaran/Pendekatan	S1			D3	
		PTN A	PTS A	PTS B	PTN A	PTN B
1.	Dosen menggunakan ilustrasi dari buku teks	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tutorial	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya
3.	Studi Kasus	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Pembicara dari Luar (Dosen Tamu)	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
5.	Panduan belajar yang dikembangkan sendiri	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
6.	Jurnal/Artikel akuntansi pemerintahan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Menurut (Hoque, 2002) jurnal atau artikel dapat dijadikan metode pengajaran alternatif untuk mata kuliah akuntansi sektor publik pada perguruan tinggi. Hal ini juga didukung oleh (Lowensohn & Reck, 2005) yang merekomendasikan jurnal atau artikel sebagai sumber pedagogik dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Jurnal atau artikel professional diyakini sebagai salah satu cara yang sangat baik dalam memperkenalkan mahasiswa pada sumber informasi terkini yang dapat diandalkan dan dapat menjadi aplikasi praktis yang dapat memberikan gambaran nyata tentang praktek dan menjadi pedoman yang dapat digunakan dalam karir dalam bidang akuntansi sektor publik. Metode lainnya yakni pembicara dari luar juga dapat membantu dalam pengajaran akuntansi sektor publik (Lowensohn & Reck, 2005). Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik sehingga metode pengajaran atau pendekatan dengan menggunakan jurnal atau artikel ataupun mengundang pembicara dari luar dapat menjadi pertimbangan bagi dosen dalam mengembangkan metode pengajaran akuntansi pemerintahan. Mengingat masih rendahnya perhatian terhadap akuntansi pemerintahan maka dosen dapat meningkatkan perhatian mahasiswa terhadap mata kuliah ini dengan mengadopsi metode pengajaran yang aktif dan lebih fleksibel dengan memfokuskan pada *teacher-student interaction* (Lowensohn & Reck, 2005).

**Tabel 6.** Referensi Pengajaran Akuntansi Pemerintahan

No.	Referensi	S1			D3	
		PTN A	PTS A	PTS B	PTN A	PTN B
1.	Buku asing	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Buku local	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Manual	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Handout	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Tabel 6 selanjutnya menjelaskan referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan. PTN dan PTS dalam penelitian ini menggunakan referensi berupa buku lokal, manual, handout namun tidak satu pun yang menggunakan buku asing sebagai referensi.

**Tabel 7.** Materi dalam Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan

No.	Materi	S1			D3	
		PTN A	PTS A	PTS B	PTN A	PTN B
1.	Gambaran Umum dan Konsep Akuntansi Pemerintahan	√	√	√	√	√

No.	Materi	S1			D3	
		PTN A	PTS A	PTS B	PTN A	PTN B
2.	Siklus akuntansi pemerintahan	√	√	√	√	√
3.	Akuntansi Pendapatan di OPD& PPKD	√	√	X	√	√
4.	Akuntansi Beban dan Belanja di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
5.	Akuntansi Kas dan Setara Kas di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
6.	Akuntansi Piutang di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
7.	Akuntansi Persediaan di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
8.	Akuntansi Aset Tetap di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
9.	Akuntansi Kewajiban di OPD& PPKD	√	√	√	√	√
10.	Akuntansi Transfer di PPKD	√	√	X	√	√
11.	Akuntansi Pembiayaan di PPKD	√	√	√	√	√
12.	Akuntansi Dana Cadangan di PPKD	√	√	√	√	√
13.	Koreksi Kesalahan	√	√	√	√	√
14.	Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan OPD	√	√	√	√	√
15.	Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	√	√	√	√	√
14.	Laporan Konsolidasi	√	√	√	√	√

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Tabel 7 diatas menggambarkan materi yang diajarkan dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan, secara umum tidak ada perbedaan signifikan antara materi yang diajarkan pada PTN dan PTS yang ada di kota Padang. Materi dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan disusun berdasarkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Namun, belum terlihat perbedaan penekanan antara materi mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diajarkan pada level S1 dan D3 pada PTN dan PTS di Kota Padang. Ini dapat menjadi bahan masukan dalam revitalisasi kurikulum akuntansi untuk dapat memberikan penekanan yang berbeda antara materi yang diajarkan pada level S1 dengan D3.

**d. Kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di Perguruan tinggi Negeri dan Swasta di Kota Padang.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi. Reformasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak perubahan dalam praktek akuntansi pemerintahan, perubahan terakhir dalam praktek akuntansi pemerintahan adalah dikeluarkannya PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan implementasi basis akrual yang tentu saja menyebabkan perubahan dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi. PP No.71 tahun 2010 dan diikuti dengan Permendagri No.64 tahun 2013 menjadi referensi utama dalam pengembangan konten mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi.

Berikut ini adalah hasil survei kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan materi yang diajarkan pada mata kuliah akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi:

**Tabel 8.** Kesesuaian Materi dengan Kebutuhan Pengguna

No.	Materi	Tidak Penting	Penting
1.	Gambaran Umum dan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan	0.97%	99.03%
2.	Siklus akuntansi pemerintahan	1.94%	98.06%
3.	Akuntansi Pendapatan di OPD	12.62%	87.38%
4.	Akuntansi Beban dan Belanja di OPD	0.00%	100.00%

No.	Materi	Tidak Penting	Penting
5.	Akuntansi Kas dan Setara Kas di OPD	1.94%	98.06%
6.	Akuntansi Piutang di OPD	14.56%	85.44%
7.	Akuntansi Persediaan di OPD	1.94%	98.06%
8.	Akuntansi Aset Tetap di OPD	2.91%	97.09%
9.	Akuntansi Kewajiban di OPD	10.68%	89.32%
10.	Akuntansi Pendapatan di PPKD	7.77%	91.26%
11.	Akuntansi Beban dan Belanja di PPKD	4.85%	95.15%
12.	Akuntansi Kas dan Setara Kas di PPKD	6.80%	93.20%
13.	Akuntansi Piutang di PPKD	10.68%	89.32%
14.	Akuntansi Persediaan di PPKD	7.77%	92.23%
15.	Akuntansi Aset Tetap di PPKD	6.80%	93.20%
16.	Akuntansi Dana Cadangan di PPKD	10.68%	89.32%
17.	Akuntansi Kewajiban di PPKD	9.71%	90.29%
18.	Akuntansi Transfer di PPKD	12.62%	87.38%
19.	Akuntansi Pembiayaan di PPKD	10.68%	89.32%
20.	Koreksi Kesalahan	2.91%	97.09%
21.	Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan OPD	0.97%	99.03%
22.	Latihan Komprehensif Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	3.88%	96.12%
23.	Laporan Konsolidasi	6.80%	93.20%

Sumber : *Data Primer yang diolah, 2018*

Secara umum, tidak ada masalah timbul dengan konten akuntansi pemerintah di PTN dan PTS dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa sebagian besar topik dalam mata kuliah akuntansi pemerintah di perguruan tinggi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, ini ditunjukkan dari jawaban responden lebih dari 85% responden setuju bahwa semua topik penting. Walaupun demikian masih terdapat beberapa topik yang dianggap tidak terlalu penting walaupun persentasenya tidak terlalu besar, untuk konteks akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada 4 topik yang responden tampaknya kurang penting yaitu akuntansi piutang, akuntansi pendapatan, dan akuntansi kewajiban ini terlihat dari persentase jawaban responden. Sedangkan untuk konteks pemerintah daerah (PPKD) ada 4 topik yang dianggap tidak terlalu penting bagi responden diantaranya akuntansi pendapatan, akuntansi dana cadangan, akuntansi transfer dan akuntansi pembiayaan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi sebenarnya telah menyusun kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### Hambatan Dan Tantangan

Berdasarkan survei yang telah dilakukan pada *stakeholders* terhadap pengajaran akuntansi pemerintahan maka dapat diidentifikasi beberapa hambatan dan tantangan dalam pengajaran akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi. Hambatan pertama adalah masih terbatasnya tenaga pengajar atau dosen dengan latar belakang akuntansi pemerintahan ini terlihat pada latar belakang pendidikan dosen yang didominasi dengan bidang keahlian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hambatan kedua adalah rendahnya minat dosen dalam mengajarkan mata kuliah ini, ini merupakan tantangan terbesar dalam pengembangan pengajaran akuntansi pemerintahan. Hambatan ketiga adalah metode pengajaran yang digunakan selama ini masih menggunakan metode konvensional seperti dosen menggunakan buku teks dan studi kasus.

Beberapa tantangan juga dapat diidentifikasi dari jawaban responden pada penelitian ini dalam pengembangan pengajaran akuntansi pemerintahan. Tantangan pertama adalah bagaimana membuat akuntansi pemerintahan menjadi satu bidang yang menarik untuk dipelajari sejajar dengan bidang akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sehingga akuntansi pemerintahan tidak lagi dipandang sebelah mata. Tantangan kedua adalah saat ini konten akuntansi pemerintahan yang ada diperguruan tinggi masih bersifat manual, padahal saat ini praktek akuntansi pemerintahan telah menggunakan *software* atau aplikasi. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk mengintegrasikan praktek akuntansi pemerintahan yang



bersifat *computer based* dalam pengajaran akuntansi pemerintahan. Tantangan ketiga adalah bagaimana mengembangkan metode pengajaran akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi yang diharapkan juga dapat meningkatkan minat mahasiswa terhadap bidang akuntansi pemerintahan. Tantangan keempat adalah bagaimana perguruan tinggi dapat memberikan penekanan yang berbeda dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diajarkan pada tingkat S1 dan D3.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mata kuliah akuntansi pemerintahan hanya memiliki porsi yang kurang dari 4% dari total kurikulum akuntansi di perguruan tinggi baik di PTN dan PTS di Kota Padang. Responden mahasiswa dalam penelitian ini menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah mata kuliah yang menarik untuk dipelajari namun di sisi lain minat dosen dalam mengajar mata kuliah ini masih rendah padahal jumlah dosen dengan latar belakang akuntansi pemerintahan masih sangat terbatas. Metode pengajaran dan referensi yang digunakan dalam mengajar mata kuliah akuntansi pemerintah juga masih konvensional, ini menjadi bahan pertimbangan bagi dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan untuk mengembangkan metode pengajaran dan referensi sehingga meningkatkan minat terhadap bidang akuntansi pemerintahan dan dapat mendorong semakin banyaknya dosen memiliki latar belakang bidang ini. Di sisi lain, konten mata kuliah akuntansi pemerintahan saat ini telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, namun sifatnya masih manual sedangkan praktek akuntansi pemerintahan di lapangan telah menggunakan aplikasi/*software*, hal ini tentu saja dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan konten mata kuliah akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini menemukan 3 hambatan utama dalam pengajaran akuntansi pemerintahan yaitu: 1) keterbatasan dosen dengan latar belakang akuntansi pemerintahan; 2) rendahnya minat dosen dalam mengajar mata kuliah akuntansi pemerintahan; dan 3) metode pengajaran yang bersifat konvensional. Penelitian ini juga mengidentifikasi 4 tantangan ke depan dalam pengembangan pengajaran akuntansi pemerintahan di perguruan tinggi yaitu: 1) bagaimana membuat akuntansi pemerintahan menjadi menarik dan sejajar dengan bidang akuntansi lainnya; 2) mengintegrasikan teknologi dalam konten mata kuliah akuntansi pemerintahan; 3) pengembangan metode pengajaran untuk mata kuliah akuntansi pemerintahan dan 4) penekanan perbedaan konten yang diajarkan pada level S1 dan D3 di perguruan tinggi.

Namun penelitian ini baru dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan kuisioner, sehingga tidak dapat menggali jawaban dari responden dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode *dept in interview* untuk mengeksplorasi persepsi terkait dengan pengajaran akuntansi pemerintahan diperguruan tinggi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi-pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan mata kuliah akuntansi pemerintahan khususnya di perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hoesada, Jon. 2006 Akuntansi Organisasi Nirlaba: Akuntansi Indonesia di Tengah Kancah Perubahan.
- Hoque, Z. (2002). Using journal articles to teach public sector accounting in higher education. *Journal of Accounting Education*, 20(3), 139–161. [https://doi.org/10.1016/S0748-5751\(02\)00006-4](https://doi.org/10.1016/S0748-5751(02)00006-4)
- Krah, R. Y., & Aveh, F. K. (2013). Public Sector Accounting Education: A Neglected Element of Public Financial Management Reforms in Ghana. *International Journal of Governmental Financial Management*, XIII(1), 36–49. Retrieved from <http://www.icgfm.org/journal/2013/vol1/3.pdf>
- Lowensohn, S. H., & Reck, J. L. (2005). Methods and Resources To Increase Student Interest in Governmental Accounting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 17(2), 202–222.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- \_\_\_\_\_, 2004, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- \_\_\_\_\_, 2005, Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Robbins S.P dan Judge T.A. 2011. *Organizational Behaviour*. USA. Pearson International Edition. Pearson, Inc.
- Sciulli, N., & Sims, R. (2008). Public sector accounting education in Australian universities: Obstacles and opportunities. *Asian Review of Accounting*, 16(3), 246–262. <https://doi.org/10.1108/13217340810906690>

## LAMPIRAN

## Hasil Uji Validitas Kuisisioner Dosen

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation	Sig.	r <sub>tabel</sub>	Kriteria
1	0,739	0,000	0,2787	valid
2	0,907	0,000	0,2787	valid
3	0,768	0,000	0,2787	valid
4	0,839	0,000	0,2787	valid
5	0,833	0,000	0,2787	valid
6	0,706	0,000	0,2787	valid
7	0,786	0,000	0,2787	valid

## Hail Uji Reliabilitas Kuisisioner Dosen

No	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	0,793	Reliabel

## Hasil Uji Validitas Kuisisioner Mahasiswa

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation	Sig,	r <sub>tabel</sub>	Kriteria
1	0,597	0,000	0,10411	valid
2	0,543	0,000	0,10411	valid
3	0,680	0,000	0,10411	valid
4	0,423	0,000	0,10411	valid
5	0,537	0,000	0,10411	valid
6	0,584	0,000	0,10411	valid
7	0,555	0,000	0,10411	valid

## Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Mahasiswa

No	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	0,616	Reliabel